



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA DUMAI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INDRA GUNAWAN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **632641**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 731.889.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 555 m2/108 m2 di KAB / KOTA KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 156.740.000
2. Tanah Seluas 512 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 274.944.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 625 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 109.660.000
4. Tanah Seluas 329 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 176.673.000
5. Tanah Seluas 294 m2 di KAB / KOTA KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 13.872.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 198.750.000

1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.250.000
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOTOR, KAWASAKI TRAIL Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
4. MOBIL, HONDA MINI BUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 154.600.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 215.891.554



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.301.130.554
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.301.130.554

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.